



ASPEK HUKUM WILAYAH NEGARA INDONESIA

Dalam satu dasawarsa terakhir ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan wilayah negara menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena masalah perbatasan, terutama perbatasan antar negara bersifat multi dimensional. Permasalahan yang cukup menonjol dan sangat menarik perhatian kita akhir-akhir ini adalah berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, klaim sepihak terhadap kepemilikan sumberdaya alam/pulau/wilayah teritorial satu negara oleh negara lain, pelanggaran HAM di wilayah perbatasan (seperti *trafficking in person* atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan manusia), berbagai tindak pidana/kriminal di perbatasan (*illegal logging, arm smuggling, illegal fishing*), ancaman terorisme, dan lain sebagainya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih rawannya wilayah perbatasan antarnegara terhadap berbagai permasalahan yang bersifat multidimensi. Belum jelasnya penetapan batas wilayah antar negara merupakan salah satu pemicu bagi munculnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman terhadap konsepsi negara, wilayah negara maupun batas wilayah merupakan langkah awal bagi terciptanya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting wilayah perbatasan negara, terutama bagi terciptanya situasi yang kondusif bagi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara.

Buku ini mencoba memberikan gambaran mengenai wilayah negara dan keterkaitannya dengan hukum nasional khususnya dalam menjamin kedaulatan wilayah dan integritas bangsa dan negara, termasuk di dalamnya tentang pengaturan hukum wilayah negara serta hak negara lain di wilayah teritorial Indonesia, khususnya perairan dan udara.



Suryo Sakti Hadiwijoyo menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 1998, pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Magister Ilmu Hukum – Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan berhasil diselesaikan pada Januari 2008. Karimnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diawalnya pada tahun 2001 di Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan - Ditjen Pemerintahan Umum - Departemen Dalam Negeri (Depdagri) – Jakarta. Pada bulan Oktober 2007 penulis pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Kota Salatiga dan sampai sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga.

 GRAHA ILMU

www.grahailmu.co.id



PERPU